

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KORAN TEMPO
Subyek :
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 07/01/2009
Hari : Rabu
Halaman : A9

Gubernur dan Kepala Polda Dituntut Mundur

Sedikitnya 200 aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Riau kemarin berunjuk rasa menuntut Gubernur Riau Rusli Zainal dan Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Hadiatmoko mundur dari jabatan mereka.

Pengunjuk rasa dari Serikat Tani Rakyat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Keadilan, itu menilai kedua petinggi di Riau tersebut tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Buktinya, kata mereka, Rusli membiarkan penggusuran terhadap warga dari Dusun Suluk Bongkal Tasik Serai pada 18 Desember dan Hadiatmoko menghentikan penyidikan terhadap 13 perusahaan yang tersangkut pembalakan liar pada 22 Desember tahun lalu.

"Warga digusur, perusahaan perambah hutan dibebaskan dari jerat hukum menjadi bukti ketidakberpihakan mereka," kata koordinator lapangan Solidaritas Rakyat untuk Keadilan, Sudiarto, dalam orasinya di depan Markas Polda Riau dan kantor Gubernur Riau.

"Sudah selayaknya Gubernur Rusli Zainal dan Kepala Polda Riau mundur atau diganti. Ini keterlaluan," ujar Sudiarto. Dalam aksi yang digelar sejak pukul 11.30 WIB hingga sore itu, mereka juga membentangkan spanduk berukuran 6 x 7 meter yang bertuliskan tuntutan para pendemo.

"Aksi ini akan terus-menerus kami lakukan hingga ada penyelesaian kasus lahan Dusun Bongkal serta pembatalan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) perusahaan *illegal logging*," Sudiarto menambahkan.

Sudiarto menyebut, terkait dengan SP3 bagi 13 perusahaan yang tersangkut perambahan hutan Riau, sangat tidak masuk akal jika tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kemungkinan gratifikasi.

"Hendaknya ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya. Sudah jadi rahasia umum, kata dia, untuk jaminan peranguhan penahanan, "Maling kelas teri saja tetap harus ada ongkosnya," kata Sudiarto.

Sambil meneriakkan yel-yel tuntutan, para pendemo melakukan aksi duduk di pintu keluar kantor Gubernur Riau. "Kami bertahan sampai ada keterangan dari Gubernur Riau atas kebijakannya dalam sengketa tanah," ujar Fitra, aktivis Serikat Tani Rakyat.

"Aksi ini akan kami lakukan terus-menerus. Harapan kami, persoalan lahan hutan tanaman industri dapat diselesaikan," kata Fitra.

Hingga kemarin sore, Gubernur Rusli Zainal tidak menemui para pengunjuk rasa. Kepada *Tempo*, Rusli mengatakan tuntutan agar dirinya mundur merupakan hak masyarakat. "Itu hak mereka, kami berpegang pada kepastian hukum," kata Rusli melalui telepon kemarin.

Namun, dia menilai pemerintah daerah punya kewajiban menjaga investasi. "Kami juga wajib menjaga investasi yang ada. Saya tetap berpihak kepada rakyat," kata Rusli.

Sebelumnya, Kepala Polda Riau Hadiatmoko menyebut siap menerima konsekuensi atas keputusan mengeluarkan SP3 atas 13 perusahaan itu. Kepada *Tempo*, Hadiatmoko mengatakan keputusan mengeluarkan SP3 semata berdasarkan alasan hukum.